

### **BAB III**

#### **PERAN H.M. SUBCHAN ZE DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA**

**(1959-1973)**

##### **A. H. M. Subchan ZE pada masa Orde Lama**

Sebagaimana disebut sebelumnya, NU mengakhiri keterlibatannya dalam Masyumi lebih awal ketimbang Muhammadiyah. Lalu pada awal bulan Mei 1952, NU menjadi partai politik independen. NU mengundurkan diri dari keanggotaan Masyumi karena merasa kecewa dengan peran dominan atau dominasi kaum modernis dalam partai politik. Pada 1952, terjadi transformasi kepemimpinan politik dari Sukiman Wirdjosan djojo kepada Muhammad Natsir. Sukiman dikenal sebagai pemimpin akomodatif yang memberikan lebih banyak ruang bagi kelompok pesantren (NU) ketimbang Natsir. NU diberi posisi keanggotaan dalam Dewan Syura dengan jumlah umat NU, dan kurang signifikan dalam proses politik. (pengambil putusan).<sup>76</sup>

Kiprah politik NU sebenarnya mulai transparan sejak terbentuknya yang kemudian menjadi partai politik pada Mukatamar al-Islam di Yogyakarta 7-8 Nopember 1945. Dukungan NU kepada Masyumi pada mulanya memang tampak bersemangat dengan seruan kepada para anggota sendiri maupun masyarakat untuk

---

<sup>76</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 82-83.

bergabung dengan Masyumi. Dalam Mukhtamar XIV di Purwokerto pada tahun 1946 diserukan agar warga NU membanjiri partai politik Masyumi di mana NU akan menjadi tulang punggungnya.<sup>77</sup>

Ketika NU menjadi partai politik sejak berpisah dengan Masyumi yang diputuskan pada Mukatamar di Palembang akhir April 1952, organisasi ini menghadapi tantangan persaingan ideologi dalam bentuk partai-partai politik yang masing-masing menawarkan cita-citanya tentang Indonesia masa depan. Ini terjadi pada masa awal Republik Indonesia. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, bangsa ini menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar yang memperebutkan Indonesia.<sup>78</sup>

Namun dalam perkembangannya selanjutnya, timbul beberapa persoalan yang mendorong NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 pada Mukhtamar XIX di Palembang. Perbedaan kepentingan politik antar kelompok dalam Masyumi yang berupa pendistribusian kekuasaan adalah faktor yang cukup berpengaruh, disamping ketidakmampuan para pemimpin Masyumi melakukan negoisasi dan kompromi-kompromi antar anggota. Jika dilihat dari latar belakang masing-masing individu yang ada dalam Masyumi, secara umum dapat dikatakan bahwa politisi dan pemimpin NU terdiri atas ulama atau mereka yang merupakan alumni pesantren dan walaupun ada yang berpendidikan model Barat, jumlahnya sedikit. Sementara

---

<sup>77</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 57.

<sup>78</sup>Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad* (Yogyakarta: Lkis, 2008), 28.

kalangan non-NU memandang rendah lulusan pesantren. Inilah yang berpengaruh terhadap kurang harmonisnya hubungan antara anggota Masyumi dari NU dan kelompok lain.<sup>79</sup>

Ada banyak alasan mengenai terjadinya perpecahan tersebut, termasuk perbedaan doktrin yang mendasar. Tetapi kejadian yang sekarang adalah perelisihan mengenai jabatan menteri agama.<sup>80</sup> Ketika mengetahui pasti, bahwa M. Natsir selaku Ketua Umum Partai Masyumi memutuskan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam partai ada ditangan Dewan Partai, Ra'is 'Am PBNU mengambil keputusannya sendiri. Ra'is 'Am KH A. Wahab Chasbullah memerintahkan kepada ketua umum PBNU, KH A. Wahid Hasyim agar mengatur keluarnya NU dari partai tersebut. Hal ini terjadi dalam muktamar NU di Palembang tahun 1952, yang sekaligus menunjukkan dominasi ulama di lingkungan NU.<sup>81</sup>

Ketika NU menjadi partai politik, garis perjuangannya sangat jelas, yakni “menegakkan syariat Islam, dengan berhaluan salah satu dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, syafi'i, dan Hanbali serta melaksanakan hukum-hukum Islam dalam masyarakat”. Di sini terlihat jelas bahwa NU tidak pernah mengupayakan berlakunya syari'at Islam secara formal melalui negara. Konsepnya yang begitu luwes di bidang

---

<sup>79</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, 57.

<sup>80</sup>M. C. Ricklefs, *sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 509.

<sup>81</sup>Abdurrahman Wahid, *Abdurrahman Wahid Selama Era Langser: Kumpulan Kolom dan Artikel* (Yogyakarta: Lkis, 2002), 109.

politik dan senantiasa andil dalam berbagai keputusan pemerintah pada saat itu dinilai “terlalu kiri” oleh kelompok modernis.<sup>82</sup>

Antara bulan April dan Agustus 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik tersendiri yang dipimpin oleh Wachid Hasjim hingga saat meninggalnya pada tahun 1953. Perpecahan itu meninggalkan kepahitan yang dalam. Sehingga terlihat jelas bahwa NU, yang basisnya terutama di Jawa Tengah dan khususnya di Jawa Timur, merasa lebih mudah untuk bekerja sama dengan partai-partai lain yang mempunyai basis di Jawa, yaitu PNI, daripada dengan Masyumi.

### **1. H.M Subchan ZE dan Demokrasi Terpimpin**

Dalam suatu episode sejarah, NU pernah mengalami suatu proses yang sedikit rumit, tepatnya pada akhir Orde Lama dan awal Orde Baru. Langkah Subchan ZE untuk menurunkan presiden Soekarno dan membubarkan PKI memang mendapatkan dukungan baik dari intern NU maupun pihak ABRI atau Angkatan Darat. Sayangnya, masa-masa untuk menuai simbiosis mutualisme antara NU dan ABRI itu berhenti justru ketika PKI sudah dibubarkan dan Soekarno sudah benar-benar jatuh. Ironisnya, polemik yang berawal dari

---

<sup>82</sup>Fathurin Zen, *NU Politik” Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 34.

eksistensi Subchan sebagai representasi politik NU versus pemerintah justru merembet kepada polemik NU secara internal.<sup>83</sup>

Di tengah-tengah krisis tahun 1957, diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan “demokrasi terpimpin”. Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus berubah sepanjang salah satu masa paling kacau dalam sejarah Indonesia. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya diambil bersama-sama dengan pemimpin angkatan bersenjata. Pada waktu itu, beberapa pengamat menganggap Soekarno sebagai diktator dan, ketika sikapnya semakin berapi-api, beberapa pengamat cenderung menganggapnya hanya sebuah karikatur yang sudah lanjut usia. Soekarno tidak seperti itu semua, dia adalah ahli manipulator rakyat dan manipulator lambang-lambang.<sup>84</sup>

Masa tahun 1957-1965 merupakan masa ketika peranan demokrasi Indonesia bukan saja menurun tetapi hampir saja menjadi diktator. Terutama dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, masa ini mencatat bangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa segan setiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Sistem ini disebut

---

<sup>83</sup>M. Lutfi Thomafi, *Mbah Ma'shum Lasem: The Authorized Biography of KH. Ma'shum Ahmad* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 157.

<sup>84</sup>M. C. Ricklefs, *sejarah Indonesia Modern*, 533.

populer Demokrasi Terpimpin, nama yang diberikan kepada Presiden Soekarno sendiri.<sup>85</sup>

Gagasan demokrasi Terpimpin sebenarnya sudah dicetuskan Soekarno sejak awal 1957. Menurut Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin dapat dijabarkan sebagai “demokrasi murni yang berdasarkan suatu ideologi yang memimpin dengan menentukan tujuan serta cara mencapainya”. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan untuk mufakat di antara semua golongan justru menjadi alat tunggangan Soekarno untuk meraih kekuasaan tunggal.<sup>86</sup>

Dalam perjalanan kepemimpinan Subchan, ia pernah dirisaukan oleh keputusan Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, karena Dekrit tersebut mengarah pada pembentukan Demokrasi Terpimpin, yang bagi Subchan adalah pengkhianatan terhadap gagasan Demokrasi itu sendiri. Karena itu, ia menggabungkan diri ke dalam kelompok oposisi yang terhimpun dalam Liga Demokrasi. Demokrasi menurut Subchan adalah sebuah proses tukar-menukar gagasan dan kekuatan, dari pergumulan ide dan kekuasaan itulah kemudian bisa dirumuskan pendapat bangsa. Dari peristiwa tersebutlah Subchan mulai tampil di publik sebagai kalangan muda yang berani kritis terhadap pemerintah.

---

<sup>85</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1987), 349.

<sup>86</sup>Jan S aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2005), 330.

## 2. KAP-Gestapu

Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 merupakan sejarah tragis bangsa Indonesia yang tidak terlupakan. Tujuh jendral palang pertahanan negara ini telah menjadi korban. Kejadian ini tentu menyulut reaksi rakyat Indonesia yang memang berada dalam kondisi krisis. Seluruh elemen masyarakat seakan bergolak, termasuk mahasiswa yang memang memiliki idealisme serta tanggung jawab sebagai generasi muda bangsa. Front Pancasila pun bergerak pada 1 Oktober 1965 dan kemudian disusul dengan berdirinya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) tanggal 25 pada bulan dan tahun yang sama, sebagai wadah bagi aksi mahasiswa yang diprakarsai oleh Pak Syarif Tayib. Organisasi ini terdiri dari ekstra universitas yang di dalamnya PMII, PMKRI, HMI, GMKI dan lain-lain.<sup>87</sup>

Dalam “Front Pancasila” yang merupakan koalisi partai-partai politik yang menentang G-30-S/PKI, tokoh Islam yang memenuhi syarat tersebut adalah Subchan ZE. Karena mewakili Nahdlatul Ulama (NU) yang masih merupakan bagian unsur pendukung pemerintahan “NASAKOM”-nya Soekarno, Akan tetapi figur Subchan sendiri tak terlalu banyak muncul dalam pentas politik era Demokrasi Terpimpin. Sebagai pemimpin “generasi baru” NU yang lebih muda, dinamis dan berwawasan modern, Subchan merupakan

---

<sup>87</sup>Sofjan Wanandi, “Potret Futuristik Zamroni”, dalam *Mohamad Zamroni Tokoh Kunci Angkatan '66*, ed. Rofiqul Umam Ahmad (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), 67.

“reformis” di dalam lingkaran NU, yang amat kritis terhadap pemerintahan Soekarno dan punya hubungan cukup dekat dengan generasi muda intelektual Islam, khususnya HMI dan PMII.<sup>88</sup>

Dipilihnya Subchan<sup>89</sup> merupakan hal yang wajar karena ia, secara vokal, sangat anti-komunis. Selain itu, ia juga mempunyai hubungan dengan beberapa jendral Angkatan Darat dan dengan kelompok-kelompok pemuda dari lingkaran NU, baik muslim maupun non-muslim. Karena belum berkeluarga ia dapat mengambil resiko. Dan juga, kekayaan pribadinya memungkinkan ia bergerak lebih cepat dan membiayai segala keperluan para aktivis yang dikerahkan. Subchan juga cukup tangkas menanggulangi situasi yang rawan. Sebagai satu-satunya tokoh NU yang dapat dihubungi dirumahnya, ia ditugaskan untuk “menjaga kekompakan NU dan mempelajari siapa ini” yang dibelakang peristiwa 1 Oktober. Subchan diberi wewenang untuk bergabung dengan “siapa saja”.<sup>90</sup>

Subchan telah siap bertindak. Dengan Harry Tjan Silalahi dari Partai Katolik, ia membentuk “Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Kontra-Revolusi 30 September (KAP-Gestapu)”. KAP dijadikan tempat untuk menggabungkan unsur-unsur pemuda Islam, nasionalis dan Kristen, menjadi titik persekutuan pemuda anti-komunis. Tanggal 4 Oktober, KAP-Gestapu

---

<sup>88</sup>Ibid., 112.

<sup>89</sup>Pada saat itu Subchan masih berumur 34 tahun dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua IV PBNU

<sup>90</sup>Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), 78.

mengadakan demonstrasi pertama yang menuntut pelarangan partai-partai yang telah merencanakan atau mendukung “Gerakan 30 September”, yaitu PKI dan organisasi-organisasinya, yang mendalangi mendukung dan bersimpati terhadap G 30 S. Statemen itu dibacakan oleh Subchan sendiri. Selain itu, mereka juga menuntut agar harta orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa itu disita dan perangkat-perangkat pemerintah segera dibersihkan dari unsur-unsurnya.<sup>91</sup>

Tampilnya Subchan memimpin KAP Gestapu, menurut Harry Tjan Silalahi dalam wawancaranya dengan penulis (Andree Feillard), karena dia adalah tokoh partai NU yang disegani dan populer di kalangan kaum muda. Subchan mendapat pengakuan dari mereka, karena itu banyak kaum muda waktu itu yang minta Subchan untuk mengorganisasikan perlawanan rakyat melawan PKI. Pada waktu itu Subchan dinilai sebagai tokoh muda senior yang penuh dedikasi dan bisa diterima oleh semua pihak. Rapat umum pertama yang diadakan oleh KAP di Taman Sunda Kelapa tanggal 4 Oktober, oleh para tokohnya, dinilai mempunyai pengaruh yang besar terhadap terus mengalirnya demonstrasi rakyat memprotes G30S, meskipun rapat itu sendiri dilukiskan sebagai situasi yang mencekam dan berbahaya karena diadakan dalam keadaan di mana kawan dan lawan masih belum jelas betul sosoknya. Dalam rapat ini mengalir serangan rakyat terhadap G30S serta tuntutan

---

<sup>91</sup>Ibid., 79.

dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya. Jika kita menengok ke belakang, maka akan terlihat jelas bahwa usaha PKI untuk mengacaukan situasi, sudah dimulai sejak Soekarno memperlakukan baik Dekrit Presiden 5 juli 1959 maupun Kepres No.7 tahun 1959 yang mengatur dapat tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dengan ketentuan-ketentuan khusus.<sup>92</sup>

NU menyatakan penolakan terhadap PKI pada tanggal 4 Oktober 1965 sejumlah pemimpin partai dan ormas menghadiri rapat umum dan NU mengambil posisi aktif di dalamnya. Rapat umum ini mengeuarkan pernyataan bersama yang berisi : (1) mengutuk G30S/PKI, (2) menuntut dibubarkannya PKI dan ormas-ormasnya, dan (3) membersihkan kabinet dari unsur-unsur pendukung Gestapu. Aksi NU anti Komunis terutama di motori oleh Subchan ZE, seorang tokoh muda NU yang saat itu menjabat Wakil Ketua. Subchan ZE kemudian membentuk KAP (kesatuan Aksi pengganyangan) Gestapu, yang mendapat banyak dukungan dari berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa. Subchan ZE diangkat sebagai ketua dan Lukman Harun dari Muhammadiyah sebagai sekjen. Aksi KAP Gestapu terjadi pada tanggal 9 November 1965. Aksi ini berjalan seiring dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI).<sup>93</sup> Yang kesemuanya melahirkan suatu gelombang yang dahsyat, gelombang tuntutan

---

<sup>92</sup>Arie Mudatsir Mandan, "Subchan ZE dalam Kostelasi Politik Pasca 1965", *Prisma* (Oktober 1983). 202.

<sup>93</sup>Jan S aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam*, 342.

terhadap pembubaran PKI. Memasuki tahun 1996, oposisi terselubung menjadi penentang terbuka, dengan menggunakan kesatuan-kesatuan aksi yang kemudian membentuk Front Pancasila, dengan ketua Subchan ZE, sebagai tandingan Front Nasional.<sup>94</sup>

Kuatnya dominasi “militerisme” menyebabkan lahirnya pernyataan sikap NU yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 1965: pernyataan yang uniknya berisi tuntutan pembubaran PKI dan ormas-ormas kiri lainnya. Uniknya rumusan naskah tersebut disiapkan oleh Subchan ZE dan beberapa elite GP Ansor. Pagi buta jam 01.35 WIB rancangan pernyataan telah siap untuk ditandatangani. Tentu saja para *Kyai* sudah tidak ada di kantor PBNU dan sulit untuk dijumpai. Baru kesokan harinya tanggal 5 Oktober 1965 tepat pada prosesi penguburan tujuh Pahlawan Revolusi, PBNU mendatangi pernyataan tersebut. Mereka yang menandatangani adalah Ketua I PBNU KH A Dachlan dan ketua II KH Achmad Syaichu. Kemudian disusul para pemimpin ormas dibawah payung NU ikut menandatangani. Dalam proses pembuatan pernyataan tersebut, generasi muda NU terkesan “memaksa” PBNU (dalam hal ini para *Kyai*) untuk melakukan penandatanganan pernyataan sikap tersebut. KH Idham Chalid sendiri menandatangani pernyataan tersebut pada saat rapat kabinet di Bogor.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Imam Toto K Rahardjo dan Suko Sudarso, *Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), L.

<sup>95</sup>Budi Susanto (ed), *Politik & Postkolonialitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 61-62.

Meskipun dari awal sudah mencurigai adanya keterlibatan PKI dalam peristiwa 1 Oktober tapi, para *Kyai* sangat hati-hati dalam masalah politik tersebut. Merasa khawatir salah langkah akibat adanya “pemaksaan”, maka pada tanggal 14 Oktober 1965, PBNU mengeluarkan “Surat PBNU, Pedoman Politik Pemberitaan Harian NU”. Pedoman politik tersebut dikirim kelima media masa tersebut diantaranya berisikan agar menjaga hubungan baik dengan PKI dan Presiden Soekarno. Tampaknya pedoman politik tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat, terutama warga NU. Yang lebih bergema di hati masyarakat adalah pernyataan politik 4 Oktober, yang menyerukan pembasmian PKI dan antek-anteknya yang terlibat dalam G30 September.

Subchan ZE tokoh utama yang melahirkan pernyataan politik tanggal 4 Oktober 1965, secara konsisten mengawal gagasan tersebut hingga ke basis-basis NU di tingkat bawah. Sebagai salah seorang elite NU tampaknya Subchan ZE sadar betul kalau struktur organisasi NU berbentuk “paternalistik”. Sehingga dalam mengawal gagasan tersebut, Subchan ZE, menurut Kairul Anam kurang lebih lima hari setelah peristiwa politik di Jakarta tokoh mudah NU ini menemui beberapa Ulama strategis NU di daerah eks-Karesidenan Besuki. Di Situbondo dengan menumpang helikopter Angkatan Laut Subchan ZE menemui KH As’ad Syamsul Arifin di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus. Dari sana langsung meluncur ke

Pondok Pesantren Nurul Jadid guna menemui KH Zainul Mun'im. Dari berbagai pertemuan tersebut ia meminta dukungan dua *Kyai* yang menjadi panutan di daerah eks-Karesidenan Besuki.<sup>96</sup>

Subchan terus mengorganisir demonstrasi-demonstrasi anti-PKI yang pada bulan Oktober, menurut harian-harian anti-komunis, sudah berhasil mengerakkan ratusan ribu orang. Namun konfrontasi yang sebenarnya dengan Soekarno dapat dikatakan mulai terjadi bulan November, dengan adanya demonstrasi anti-komunis yang luar biasa besarnya di pusat Jakarta, yaitu lapangan Banteng. Slogan-slogan masih memihak Soekarno, namun demonstrasi yang sedemikian dahsyat itu (dihadiri 1,5 juta orang menurut pers) merupakan sebuah tekanan yang tidak dapat diabaikan oleh kepala negara.<sup>97</sup>

Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar. Dimotori oleh KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966. Aksi-aksi mereka dilancarkan sepanjang jalan di kota Jakarta dan juga mendatangi pimpinan DPR-GR agar tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden

---

<sup>96</sup>Ibid., 62-63.

<sup>97</sup>Andree Feillard, *NU vis-s-vis* Negara, 85.

Soekarno. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintahan yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni:

1. Bubarkan PKI
2. Turunkan harga/perbaiki ekonomi
3. Retool Kabinet Dwikora.<sup>98</sup>

Sementara itu mahasiswa dan pemuda di Bandung mencetuskan Petisi Ampera yang ditujukan langsung kepada Presiden dan juga kepada DPR-GR. Petisi itu berisi tuntutan untuk pembubaran PKI dan penanggulan ekonomi dengan penurunan harga. Aksi demonstrasi yang semula dilakukan di Jakarta dan Bandung menjalar ke kota-kota lain di Indonesia, dan ternyata aksi-demonstrasi itu mendapat dukungan dari berbagai kekuatan sosial lainnya maupun Front Pancasila serta rakyat umum.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Saleh A. Djamhari, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 23.

<sup>99</sup>Ibid., 24.

## **B. H.M. Subchan ZE pada Masa Orde Baru**

Tatkala rezim Soekarno jatuh pada 1966, rezim kekuasaan baru yang tengah bangkit mulai menyebut periode “Demokrasi terpimpin” sebagai Orde Lama dan merayakan era baru sebagai “Orde Baru”. Meskipun sampai 17 Oktober 1976 Soekarno masih resmi menjabat sebagai presiden Indonesia, kekuasaan riilnya telah runtuh sejak peristiwa “Gerakan 30 September” (Gestapu) 1956. Yang menjadi landasan-landasan bagi rezim “Orde Baru” adalah ‘mandat’ yang kontroversial dari Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Mandat yang memberikan kepercayaan kepada Letnan Jendral Suharto, yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat sejak Oktober 1965, untuk menjalankan tugas mengoordinasi kekuasaan pemerintah. “Mandat” ini dikenal dengan sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Superemar). Suharto kemudian mengambil alih kendali politik nasional setelah berlangsungnya gelombang demonstrasi mahasiswa anti-komunis dan anti-Soekarno di ibu kota negara dan kota-kota lain yang mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Pada tanggal 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengangkat Suharto sebagai Pejabat presiden Indonesia.<sup>100</sup>

Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai tumbuhnya harapan-harapan akan kebaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi

---

<sup>100</sup>Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 451-452.

pembangunan politik kearah demokratisasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya *power relationship* antar negara dan masyarakat. Diharapkan kekuatan politik masyarakat menaik dan memperoleh tempat yang proposional dalam proses politik pemerintahan, terutama dalam rangka formulasi kebijakan-kebijakan politik baru. Sebaliknya, akumulasi dan sentralisasi kekuasaan yang selama Orde Lama begitu jelas terkontruksikan. Diharapkan segera berganti dengan pluralisme kekuasaan. Dalam keadaan semacam itu, demokratisasi diharapkan tumbuh dan terwujud, tidak sekedar menjadi politik pemerintah Orde Baru yang sedang menumbuhkan dirinya itu.<sup>101</sup>

Harapan akan tumbuhnya demokrasi di awal Orde Baru dimiliki tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa memperoleh peluang politik baru, namun juga dimiliki oleh berbagai kalangan lain secara luas. Studi Francois Raillon menunjukkan bahwa para mahasiswa di kampus-kampus pada saat itu, memiliki harapan besar terhadap tumbuhnya suasana politik baru yang lebih segar dan demokratis. Harapan yang serupa juga diungkapkan oleh Hatta, Mochtar Loebis, dan T.B. Simatupang.<sup>102</sup>

Subchan ZE mempunyai peran yang sangat besar pada proses peruntuhan Orde Lama, meskipun pada saat itu ia masih muda tapi ia sangat vokal dalam pemerintahan Soekarno. Ia dipilih untuk menjadi ketua Kesatuan Aksi Pengganyangan atau disingkat KAP Gestapu pada masanya. Dengan para pemuda

---

<sup>101</sup>Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 21.

<sup>102</sup>Ibid.,

lainnya ia bergerak untuk memusnahkan PKI, semua pemuda berkumpul dari berbagai golongan dan mereka mempunyai tujuan yang sama. Yakni ingin keluar belenggu Orde Lama dan melawan PKI.

Orde Baru dibangun di atas puing-puing berdarah dengan awal suatu peristiwa yang menyimpan akibat yang sangat luas dan dalam yaitu kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh sekelompok perwira muda Angkatan Darat.<sup>103</sup> Proses kemunculan Orde Baru bukan sesuatu yang berjalan dengan enak, melainkan justru memakan korban besar. Akan tetapi, berangkat dari berbagai trauma tersebut, Orde baru segera melakukan berbagai strategi yang secara khusus sangat berorientasi pada ekonomi dan pembangunan. Strategi ini belajar dari masa Orde Lama yang karena sangat politis maka konsentrasi negara dalam membangun kehidupan ekonomi dan pembangunan sangat terabaikan. Orde Baru dalam banyak hal tidak mau mengulangi kegagalan Orde Lama. Orde Baru dengan segera membersihkan dirinya dari berbagai elemen yang diperkirakan dapat merugikan kestabilan atau yang menyebabkan disintegrasi.<sup>104</sup>

Runtuhnya negara Demokrasi Terpimpin tidak mengakibatkan lumpuhnya peran politik dan penguasaan ekonomi sekelompok militer (Angkatan Darat). Sebaliknya setelah memusnahkan musuh bebuyutannya (partai komunis) yang diduga kuat mendalangi percobaan kudeta 30 September 1965 dan menurunkan kekuasaan

---

<sup>103</sup>Daniel Dhakiade, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 200-201.

<sup>104</sup>Aprinus Salam, *Oposisi Sastra Sufi* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 118.

Soekarno, sejak tahun 1966 mereka berhasil membangun rezim yang disebut dengan Orde Baru, yaitu “sebuah pemerintahan militer yang dipimpin oleh Presiden Soeharto”. Negara Orde Baru (Orba) yang semakin kuat mencengkeramkan kekuasaannya setelah Soeharto dilantik menjadi presiden penuh oleh MPRS pada bulan Maret 1968.<sup>105</sup>

Dalam rangka mencari dukungan dan konsolidasi ke dalam, pertama-tama yang ditempuh rezim Orde Baru adalah memperkokoh legitimasi dwifungsi, baik secara ideologis maupun politis telah dicarikan landasan konstitusionalnya yang antara lain melalui pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu berbagai landasan depolitisasi terhadap semua kekuatan politik untuk mempersempit kemungkinan terjadinya konflik mulai direncanakan secara sistematis. Berbagai upaya untuk menciptakan “stabilitas” politik benar-benar diagendakan.<sup>106</sup>

Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin bebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan pemimpin muda baru dan suatu zaman baru, suatu “angkatan 66”<sup>107</sup>. Namun, dalam waktu beberapa tahun, elite Orde Baru – yang intinya terdiri atas faksi militer yang didukung oleh sekelompok kecil sipil-

---

<sup>105</sup>Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003), 45.

<sup>106</sup>Anas Saidi (ed), *Menekuk Agama, Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru* (Jakarta: Desantara, 2004), 87.

<sup>107</sup>Angkatan 66 adalah aksi besar-besaran pada tahun 1966 yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) adalah buah keringatnya Sahabat Zamroni bersama mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di Indonesia dan sahabat Zamroni dipilih sebagai Ketua Presidium KAMI Pusat (Mulai pertama dibentuk sampai bubar), KAMI adalah motor gerakan mahasiswa angkatan 66 yang bertujuan untuk merobohkan rezim orde lama (Orla), yang pada saat itu Ir. Soekarno sebagai presiden yang memakai sistem terpimpin

telah mangasingkan banyak sekutunya. Periode 1965-75 mengundang beragam pendapat dari pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Diantara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat yang disamping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.<sup>108</sup>

Jendral Suharto menduduki kursi kepresidenan secara bertahap, dari tahun 1965 hingga 1968. Selama masa itu, dua orang NU memainkan peran yang menentukan, yaitu Achmad Sjaichu di dewan Perwakilan Rakyat (DPR-GR) dan Subchan di Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS). Sjaichu, Menteri dan Wakil Ketua Parlemen yang diwariskan oleh Demokratisasi Terpimpin, diangkat menjadi juru bicara Dewan tanggal 2 Mei 1966. NU tidak menduduki posisi penting ini sejak 1963. Perannya sangat menentukan, sebab mempermudah *reshuffel* yang dilakukan secara berturut-turut demi keuntungan kelompok politik yang dekat dengan Orde Baru dan membuat para Wakil Rakyat berhaluan Komunis semakin hari semakin terpojok.<sup>109</sup>

Untuk mendapatkan landasan-landasan yuridis dan konstitusional Letnan Jendral Soeharto meminta kepada Sidang Umum ke IV MPRS tanggal 11 Juni 1966

---

<sup>108</sup>Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern*, 587.

<sup>109</sup>Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, 97.

untuk mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret serta tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan SP 11 Maret itu. Dalam sidang yang membicarakan Surat Perintah 11 Maret, maka sidang berpendapat bahwa SP 11 Maret itu perlu diperkuat dengan suatu ketetapan MPRS, karena tindakan-tindakan yang diambil oleh Letnan Jendral Soeharto dinilai pisitif. Pengukuhanannya melalui MPRS adalah ketetapan No. IX/MPRS/1996 yang mengandung penjelasan sebagai berikut:

1. Menerima baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Mandataris MPRS yang dituangkan dalam surat perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Jendral Soeharto dan meningkatkannya sebagai ketetapan MPRS.
2. Surat Perintah 11 Maret mempunyai daya laku sampai terbentuknya MPR hasil pemilihan umum.
3. Mempercayakan kepada Letnan Jendral Soeharto pemegan Surat Ketetapan MPRS untuk memikul tanggung jawab yang terkandung di dalamnya dengan penuh kebijaksanaan. Ketetapan MPRS yang diberikan kepada Letnan Jendral Soeharto ini ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Harian MPRS Mayor Jendral Wilujo Poespodjo, serta wakilnya Osa Maliki dan H. M. Subchan Z.E.<sup>110</sup>

Di MPRS, Subchan diangkat menjadi salah seorang Wakil Ketua MPRS, mewakili kelompok Islam (1966 hingga 1971). Dengan demikian ia mendahului Idham Chalid yang masih tetap dianggap Soekarnoïs oleh Angkatan Darat. Kelompok

---

<sup>110</sup>Saleh A. Djamhari, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 75-76.

Katolik memberikan dukungan mereka kepada Subchan yang saat itu belum setenar kemudian hari. Pemimpin Partai Katolik, Kasimo, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Subchan adalah seorang “Pancasilais sejati”, dan motor yang kuat dalam pemberantasan Gerakan 30 September.<sup>111</sup>

Dalam masa sidang MPRS bulan Juni-Juli 1966, Subchan terpilih sebagai Wakil Ketua yang dijabatnya sampai pelantikan MPR hasil pemilu tahun 1971. Di MPRS ia menjadikannya sebagai gelanggang permainan politik, peranan Subchan, yang paling utama adalah menjadi penghubung antara kesatuan aksi dan MPRS, karena kedekatannya dengan kelompok-kelompok massa tersebut. Di samping itu karena pengetahuannya dan pengalamannya dibidang ekonomi dan perdagangan. Subchan sebagai Wakil Ketua MPRS ditugasi untuk memantau perkembangan pembangunan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif.<sup>112</sup>

Pada saat-saat terakhir kekuasaan Presiden Soekarno ini tokoh-tokoh senior NU yang masih menyatakan kesetiannya kepada Presiden Soekarno. Hal ini misalnya terungkap dari ucapan Achmad Sjaichu, ...”kesetiaan kita kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno sama sekali tidak berubah”. Atau ucapan Idham Chalid. “jangan coba-coba tinggalkan landasan Manipol”. Tetapi tokoh-tokoh mudanya sudah banyak yang mengebiri Soekarno. Dan yang paling menonjol diantaranya adalah

---

<sup>111</sup>Ibid.,

<sup>112</sup>Arief Mudatsir Mandan, “Subchan ZE dalam Kostelasi Politik Pasca 1965”, 204.

Subchan ZE.<sup>113</sup> Atas sebagian sikap tokoh-tokoh inilah yang nanti akhirnya membuat NU pada awal Orde Baru kurang mendapat kepercayaan dari Suharto.

Pada tahun-tahun awal Orde Baru, NU diperlakukan dengan kecurigaan. Hal ini disebabkan karena partisipasi aktifnya dalam Demokrasi terpimpin, walaupun pasukan pembunuh anggota PKI yang dibentuk organisasi pemudanya, Ansor, di Jawa Timur dan usaha-usaha yang dijalankan dengan penuh semangat oleh Subchan di Jakarta telah banyak berjasa membangun kembali kepercayaan kepada NU sebagai kelompok anti komunis. Sebagian pemimpin NU yang lebih kompromis menarik diri, sementara mereka yang selama ini menentang, atau paling tidak ambivalen terhadap Demokrasi Terpimpin maju ke posisi yang lebih penting.<sup>114</sup>

Meskipun pada mulanya tokoh-tokoh senior NU masih ragu-ragu mendukung pemerintahan Suharto, tapi pada akhirnya mereka berpaling dari dukungan yang diberikan kepada Soekarno. Orde baru sendiri mengambil strategi yang tidak terlampau radikal terhadap parpol dan pendukung Orde Lama. Pada awalnya, yang dicari adalah legitimasi dan karena itu Orde Baru sibuk mengalang kerjasama dan mencari basisi dukungan dari parpol. Dan terhadap orang-orang NU, suatu seminar Angkatan Darat di Bandung memberi nasihat kepada Suharto, bahwa bila mereka diberikan status dan dana bagi kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain, Idham dan rekan-rekannya mendukung Suharto sebagaimana mereka telah mendukung Soekarno

---

<sup>113</sup>Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 89-90.

<sup>114</sup>Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, 90.

pada masa lampau. Memang, tokoh-tokoh mudanya yang tadinya mendukung kemunculan Orde Baru justru kemudian relatif kritis. Pikiran-pikiran Subchan ZE paling tidak merupakan cerminan dari kekritisannya itu. Sebagai Wakil Ketua MPRS, pada suatu kesempatan pidato radio, ia mensinyalir, “bahwasannya kaidah-kaidah Orde Baru sudah mulai kabur dan tidak lagi menjadi landasan perjuangan bagi seluruh komponen Orde Baru”. Ia lantas mengingatkan kaidah-kaidah dasar perjalanan Orde Baru yang mengandung: (1) penegakan tata kehidupan demokrasi (2) penegakan tata kehidupan hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, (3) pengusahaan adanya pendemokrasian di dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi dan (5) penegakan hak-hak asasi manusia.<sup>115</sup>

Pemerintahan Orde Baru memutuskan menjadikan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang sudah berdiri pada tahun 1964 menjadi semacam partai politik atau paling tidak melaksanakan fungsi-fungsi kepartaian meskipun tidak bernama partai politik. Kekuatan baru itu bernama Golongan Karya (Golkar). Golkar akan ikut pemilihan umum dan akan mempunyai wakil-wakil dalam parlemen.<sup>116</sup>

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 1971, Golkar melancarkan gagasan pembaharuan politik. Inti dari gagasan tersebut adalah perubahan mendasar struktur politik. Struktur politik yang ada dianggap sudah tidak mampu lagi menopang modernisasi, oleh karena itu perlu diubah, baik kuantitasnya melalui proses fusi

---

<sup>115</sup>Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, 95-96.

<sup>116</sup>Ridwan Saidi, *Kebangkitan Islam Era Orde Baru*, (Jakarta: LISP, 1993), 75.

politik, maupun orientasinya. Gagasan meninggalkan *ideologi oriented* beralih kepada *program oriented* kelak menuju kepada penerapan azas tunggal Pancasila yang tidak saja untuk partai-partai politik tetapi juga untuk organisasi kemasyarakatan. Gagasan peting lainnya yang dilontarkan oleh kalangan Golkar adalah penerapan *floating mass* atau masa mengapung. Di mana untuk tingkat desa tidak lagi dibenarkan adanya kegiatan partai politik/Golkar, kecuali diwaktu menjelang pemilu. Di luar kalangan Golkar pun mengalir gagasan pembaharuan politik mulai dari pembaharuan partai-partai politik karena dianggap membawa “dosa waris” Demokrasi Liberal dan Orde Lama sampai pada gagasan pelaksanaan “Dwi Partai Sistem” di mana terdapat satu partai pemerintahan dan satu partai di luar pemerintahan yang tidak boleh diberi kursi dalam kabinet.<sup>117</sup>

Golongan Islam merasa bahwa gagasan pembaharuan politik itu lebih ditujukan kepada mereka kepada mereka, daripada yang lainnya, misalnya golongan nasionalis. Meski mereka merasa bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) terkena sasaran pembaharuan politik, tetapi mereka dapat menikmati pelaksanaan gagasan ideologi *oriented* sebagai lebih tertuju pada saingan lamanya yaitu golongan Islam. Gagasan pembaharuan politik secara umum memang dianggap menguntungkan mereka yang secara politisi tidak mempunyai akar dalam masyarakat. Oleh karena itu golongan Islam yang masih mempertahankan konsep kepemimpinan politik yang berdasarkan *social and political acceptability* paling merasa terpukul. Dalam situasi

---

<sup>117</sup>Ibid., 81.

seperti ini kehadiran kepemimpinan politik Subchan ZE di tengah-tengah umat bagai tak tersaingi lagi. Kapasitas intelektual yang tinggi Subchan ZE tampil melakukan apologi politik bagi kepentingan golongan Islam. Fikiran-fikiran Subchan ZE dapat mengobati “rasa tak berdaya” yang menghinggapi golongan Islam. Subchan ZE dengan lincah melontarkan pembelaannya di bawah “umbrella” prinsip-prinsip demokrasi yang dihayati secara umum oleh masyarakat. Pembelaan yang dilancarkan Subchan sama sekali tidak bersifat defensif. Subchan dengan aktif dan penuh inisiatif menentengahkan fikiran-fikirannya.<sup>118</sup>

Sementara itu dalam pidato dalam pidato radio menyambut Hari Kesaktian Pancasila Oktober 1968, sebagai wakil Ketua MPRS, Subchan antara lain menekankan perlunya suatu perubahan struktur kekuatan politik yang sehat dan demokratis, perlunya ditegakkan tata kehidupan demokrasi dengan konsekuen dan perlunya ditingkatkan tindakan pemberantasan korupsi. Seruan itu merupakan refleksi Subchan atas kondisi sosial yang dinilainya cenderung mengaburkan perjuangan nilai-nilai Orde Baru yang sesungguhnya dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sudah merajalela dibanyak tingkatan kekuasaan. Pengamatan Subchan, menyimpulkan bahwa cara-cara berjuang Orde Lama yang tidak jujur dan tidak bersifat terbuka seperti jalan intrik dan konspirasi-konspirasi mulai muncul ke permukaan.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Ibid., 81-82

<sup>119</sup>Arief Mudatsir Mandan, “Subchan ZE dalam Kostelasi Politik Pasca 1965”, 209.

kritikan-kritikan yang sering dilontarkan Subchan ZE kepada pemerintahan Orde Baru akhirnya membuat Soeharto sedikit mulai memperhatikan seluruh gerak politik Subchan ZE. Subchan yang dulu merupakan salah seorang tokoh utama yang menggulingkan Orde Lama mulai mendapat sorotan dari pemerintahan Orde Baru. Karena sifat beraninya tersebut yang kemudian hari menjadikan kehidupannya mengalami masa sulit dan selalu diawasi oleh pemerintahan Soeharto.

Pada forum-forum terbuka Subchan senantiasa melansir obsesinya mengenai sistem kepemimpinan yang tidak eksklusif yang bisa mempercepat masyarakat keluar dari tradisionalisme. Ide-idenya mengenai kepemimpinan moderen ini juga merupakan kritik terhadap pola kepemimpinan Orde Baru yang semakin mengarah kepada pemusatan kekuasaan dan “golonganisme”. Subchan berpendapat, jika sebuah organisasi atau pemerintahan memilih pemimpin karena semata pertimbangan arif bijaksananya, ini merupakan langkah mundur ke abad pertengahan di mana sukses tidaknya pemerintahan tergantung pada arif bijaksananya seorang raja , atau khalifah.<sup>120</sup>

Sementara itu, sejak tahun 1970-an NU sepertinya “menjaga jarak” dengan pemerintahan, meski pada awalnya merupakan pendukung Orde Baru. Gejala demikian ini misalnya, terlihat dari kritisnya NU terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dua sosok tokoh NU yang memiliki pandangan kritis, meski dalam versi yang berbeda, yakni Subchan ZE dan K.H. Bisri Syansuri, masing-masing dari

---

<sup>120</sup>Ibid., 211.

Tanfidiyah dan dari Syuriyah. Dua sosok ini amat berpengaruh terhadap munculnya gejala “menjaga jarak” dengan pemerintahan di kemudian hari. Subchan ZE kritis terhadap pemerintah, yang dilandasi oleh nilai-nilai “liberal”, sementara Kiai Bisri dilandasi oleh nilai-nilai *fiqh*.<sup>121</sup>

Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa pengaruh Subchan sangatlah besar bagi NU maupun pemuda-pemuda di Indonesia. Dia mempunyai kekuatan untuk menggerakkan masa yang besar dalam setiap aksinya. Baik dalam rezim Orde Lama dan Orde Baru ia selalu bersikap sama, yakni berani dan tegas. Ia sering mengeluarkan kritikan-kritikan tajam pada masa Suharto. Ia terus memperjuangkan NU agar bisa menjadi partai yang terbuka dan maju, meskipun mendapat tentangan dari banyak pihak. Sampai akhir hayatnya ia berjuang memperjuangkan keadilan bagi semua warga NU khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

---

<sup>121</sup>Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, 127.